

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

WANDY SITO ANDILOLO



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

WANDY SITO ANDILOLO
A031191080



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018-2021

disusun dan diajukan oleh

WANDY SITO ANDILOLO
A031191080

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 9 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc, CA
NIP 196703191992032003

Pembimbing II

Dr. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP 196602201994122001



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018-2021

disusun dan diajukan oleh

WANDY SITO ANDILOLO
A031191080

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 20 Juli 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA	Ketua	1. 
2	Dr. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	3. 
4	Hermi Arif, S.E., CIFP., M.Com.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin





Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wandy Sito Andilolo
NIM : A031191080
Jurusan/program studi : Akuntansi/Strata satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,
Yang membuat pernyataan



Wandy Sito Andilolo

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Tritunggal Mahakudus Bapa, Putera, dan Roh Kudus atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua peneliti Agustinus, S.S., M.Pd. dan Bonawaty Ba'dung, S.E., adik Rocky Sito Andilolo dan Lois Sito Andilolo, serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan doa selama ini.
2. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing II atas waktu dan ketulusannya dalam membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Nurleni, M.Si., Ak., selaku penasihat akademik, Ibu Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA., selaku penguji peneliti, dan Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com., selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA., selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu/Bapak dosen, pegawai, dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan, pengalaman serta

bantuan yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

6. Cicilia Chintya yang telah mendukung peneliti dalam setiap tahapan penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KMK-FEB UH), teman-teman *My Trip My Funny Adventure*, teman-teman *19nite* teman-teman *SMS Choir* dan seluruh teman lainnya atas doa, dukungan, dan pengalaman yang sungguh menyenangkan.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan di Universitas Hasanuddin terlebih dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dan pengembangan kapasitas penelitian di masa yang akan datang.

Makassar, 11 Mei 2023



Wandy SITO ANDILOLO

ABSTRAK

Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Performance Analysis Of The Spending Budget In The Tourism Office of Tana Toraja Regency

Wandy Sito Andilolo
Ratna Ayu Damayanti
Sri Sundari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja periode anggaran 2018-2021, yang disusun menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran dan LAKIP Dinas Pariwisata tahun 2018-2021 yang dipublikasikan pada *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Kabupaten Tana Toraja. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, rasio efisiensi untuk menganalisis laporan realisasi anggaran dan analisis capaian *output* untuk menganalisis LAKIP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis varians belanja Dinas Pariwisata menunjukkan kinerja yang baik terbukti dari realisasi anggaran yang tidak melebihi anggaran. Analisis pertumbuhan belanja selama tahun 2018-2021 menunjukkan pertumbuhan positif akibat meningkatnya anggaran melalui dana alokasi khusus namun pertumbuhan negatif terjadi akibat situasi pandemi *covid-19*. Analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja telah melakukan harmonisasi atau keseimbangan antarbelanja. Pada analisis efisiensi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja masuk dalam kategori efisien dengan tingkat efisiensi tertinggi mencapai 68,73%. Penelitian ini juga menggunakan data LAKIP Dinas Pariwisata sebagai tambahan untuk mengetahui kinerja Dinas Pariwisata dengan melihat target yang ditetapkan dan seberapa besar hasil yang dicapai yang menunjukkan bahwa rata-rata capaian *output* 84,66% dari target yang ditetapkan. Efisiensi dan efektivitas yang telah dicapai menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja secara keseluruhan sudah baik.

Kata Kunci: Analisis Kinerja, Anggaran, Belanja, Efisiensi, Efektivitas

This study aims to determine the performance of the Tana Toraja Regency Tourism Office expenditure budget for the 2018-2021 budget period, which was prepared using descriptive quantitative research methods. The data used is the 2018-2021 budget realization report and LAKIP of the Tourism Office published on the website of the Tana Toraja Regency Information and Data Management Officer (PPID). The data analysis technique used is the ratio analysis of expenditure variance, expenditure growth, expenditure compatibility, efficiency ratio to analyze the budget realization report and interviews to strengthen the ratio analysis carried out. The results of this study indicate that the expenditure variance analysis of the Tourism Office shows good performance as evidenced by the budget realization that does not exceed the budget. Analysis of expenditure growth during 2018-2021 shows positive growth due to increased budgets through special allocation funds but negative growth occurred due to the co-19 pandemic situation. The expenditure compatibility analysis shows that the Tana Toraja Regency Tourism Office has harmonized or balanced between expenditures. In the budget efficiency analysis, the Tana Toraja Regency Tourism Office is in the efficient category with the highest efficiency level reaching 68.73%. This study also uses LAKIP data of the Tourism Office as an addition to determine the performance of the Tourism Office by looking at the targets set and how much results are achieved. In the LAKIP, it is known that the average output achievement is 84.66% of the set target. The efficiency and effectiveness that has been achieved shows that the overall budget performance of the Tana Toraja Regency Tourism Office is good.

Keyword: *Performance Analysis, Budget, Spending, Efficiency, Effectiveness*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Allocative Efficiency (Efisiensi Alokasi)	14
2.1.2 Pengukuran Kinerja Sektor Publik	15
2.1.3 Laporan Realisasi Anggaran.....	17
2.1.4 Anggaran Sektor Publik	18
2.1.5 Teori Stewardship.....	20
2.1.6 Analisis Kinerja Belanja Daerah.....	21
2.1.7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)....	27
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Rancangan Penelitian.....	32
3.2 Tempat dan Waktu	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja..	36
4.1.2 Visi Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja	36
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Tana Toraja.....	37
4.1.4 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja	38

4.2	Hasil Analisis Pengukuran Kinerja Belanja.....	44
	4.2.1 Analisis Pertumbuhan Belanja.....	45
	4.2.2 Analisis Keserasian Belanja	46
	4.2.3 Rasio Efisiensi Belanja	48
	4.2.4 Analisis Varians Belanja	49
	4.2.5 Capaian <i>Output</i> Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja	51
4.3	Pembahasan Analisis Pengukuran Kinerja Belanja.....	54
	4.3.1 Pertumbuhan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja tahun 2018-2021	54
	4.3.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja tahun 2018-2021	55
	4.3.3 Optimalisasi alokasi anggaran Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja tahun 2018-2021 melalui harmonisasi belanja.....	57
	4.3.4 Capaian <i>Output</i> Dinas Pariwisata Berdasarkan LAKIP 2019- 2021	60
BAB V PENUTUP		65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	66
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69
Lampiran.....		75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Tana Toraja.....	7
4. 1 Analisis Varians Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja	50
4. 2 Analisis Pertumbuhan Belanja Dinas Pariwisata Kab. Tana Toraja	45
4. 3 Rasio Belanja Operasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja	46
4. 4 Rasio Belanja Modal Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja	47
4. 5 Rasio Efisiensi Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja	49
4. 6 LAKIP Dinas Pariwisata Tana Toraja Tahun 2019	51
4. 7 LAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020	52
4. 8 LAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Pemikiran.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	74
2	Penelitian Terdahulu	75
3	Laporan Realisasi Anggaran 2018 - 2021.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditetapkan sejak tahun 2015 dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN). Hal ini didukung dari data Bank Dunia dimana penerimaan pariwisata di beberapa negara Asia Tenggara terus menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi di tahun 2017 sebesar 11,74%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2015 devisa di sektor pariwisata sebesar US\$10,76 miliar dan terus meningkat dan menjadi penyumbang devisa tertinggi di tahun 2019 sebesar US\$16,91 miliar. Namun, memasuki masa pandemi terjadi penurunan devisa yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2020 sebesar US\$3,31 miliar dan di tahun 2021 sebesar US\$0,54 miliar. Pada tahun 2022, seiring berjalannya waktu, pandemi sudah mampu diatasi dengan baik, sehingga terjadi peningkatan devisa menjadi US\$4,26 miliar (Badan Pusat Statistik, 2019).

Berdasarkan fakta tersebut sektor pariwisata mulai berangsur-angsur pulih, sehingga perbaikan dan peningkatan pariwisata perlu menjadi fokus perhatian pemerintah. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi kunci keberhasilan pariwisata ke depan. Dalam rangka peningkatan kepariwisataan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.300.000.000.000,00 pada tahun 2020 kepada pemerintah daerah yang meningkat menjadi Rp3.700.000.000.000,00 di tahun 2021 dan pada tahun 2022 pemerintah pusat mengalokasikan sebesar Rp3.700.000.000.000,00. Dukungan anggaran dari

pemerintah ini tentu diharapkan dapat meningkatkan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia (Limanseto, 2021).

Pemerintah harus meningkatkan kualitas pengeluaran dalam hal ini belanja secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, alokasi dan penggunaan anggaran belanja dengan sebaik mungkin sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rantetadung (2012) mengatakan bahwa alokasi dana dan bagaimana pengelolaan dari pemerintah menjadikan sektor pariwisata dapat terus mengalami perkembangan, sehingga makin banyak dikunjungi wisatawan.

Program prioritas pemerintah ini selanjutnya dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur urusan Otonomi Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan termasuk sektor pariwisata dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberlakukannya perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengatur pemerintahan, termasuk dalam hal keuangan secara lebih mandiri untuk mengidentifikasi dan menemukan sumber daya atau potensi daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat (Solikhah, 2014).

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari fungsi pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang utuh dari manajemen anggaran publik yang mana di dalamnya terdapat gambaran terkait penghitungan APBD yang dimulai dari proses

penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan evaluasi terkait penggunaan sumber daya keuangan (Putra, 2021).

Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan berkewajiban melaksanakan seluruh siklus kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah untuk dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik, masyarakat dapat mengetahui apakah anggaran telah dipergunakan secara efektif dan efisien untuk pelayanan yang optimal (Putra, 2021).

Keberhasilan dalam mengelola dana publik tentunya menjadi target pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik di suatu daerah. Berhasil atau tidaknya pemerintah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari kinerja. Melalui kinerja, masyarakat dapat mengetahui gambaran sejauh mana pencapaian pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan (Mahsun, 2016:25). Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi termasuk pemerintah untuk terus memperbaiki kinerjanya.

Menurut Mardiasmo (2009) pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan publik. Ada tiga alasan perlunya dilakukan pengukuran kinerja. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dapat membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan berfokus pada sasaran dan tujuan setiap unit kerja, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik. Kedua, pengukuran kinerja sektor publik dapat membantu dalam pembuatan keputusan dan distribusi sumber daya yang ada. Ketiga, pengukuran kinerja sektor publik sebagai sarana pertanggungjawaban publik dan perbaikan komunikasi antarlembaga. Pengukuran kinerja pada belanja daerah

tidak hanya sekedar menunjukkan kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, namun juga menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara efektif dan efisien (Sessu, 2022).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sangatlah penting. Sehingga, pemerintah daerah perlu mewujudkan konsep good governance sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah daerah dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang bersangkutan harus merealisasikan dan mengimplementasikan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu daerah otonom berperan penting dalam mengatur secara mandiri arah pembangunan yang hendak dicapai melalui penggunaan anggaran. Pemerintah kabupaten Tana Toraja telah melakukan berbagai upaya dalam hal pembangunan daerah untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Upaya yang menjadi penekanan adalah bagaimana memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah sejalan dengan program prioritas nasional.

Pariwisata merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tana Toraja dan sekaligus menjadi prioritas nasional saat ini. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 yang menjadikan Kabupaten Tana Toraja dan sekitarnya menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Keberadaan wisata budaya, wisata alam dan agrowisata, dan wisata religi memberikan daya tarik sendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara (Thoban, 2017).

Dinas pariwisata Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam hal pengembangan pariwisata, sudah seharusnya Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja lebih memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran, agar dikelola secara efektif dan efisien yang nantinya tertuang di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hal ini pula yang diungkapkan oleh Sari (2018) bahwa untuk mencapai pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, pemerintah daerah harus melakukan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku umum. Segala upaya dan hasil yang telah dicapai pemerintah daerah perlu untuk dilaporkan secara terstruktur (Amani, 2021). Secara umum, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dalam suatu periode pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik (Prasetya, 2005).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 PSAP 01, ada tujuh komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Hariyanto, 2014).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang terdiri dari gambaran mengenai komponen pendapatan, belanja, pembiayaan, dan realisasi anggaran selama periode tertentu. Adapun tujuan dari laporan realisasi anggaran, antara lain: 1. Menetapkan dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan, 2. Memberikan informasi anggaran dan realisasi dari suatu entitas. Berdasarkan definisi dan tujuan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengambil Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai alat ukur finansial untuk dikaji lebih lanjut dengan pertimbangan bahwa LRA dinilai sebagai laporan yang bermanfaat untuk memberikan penilaian atas kinerja pemerintah daerah (Sikumbang, 2022) .

Salah satu komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang penting untuk dianalisis dalam rangka menilai pencapaian kinerja adalah komponen belanja. Belanja daerah didefinisikan sebagai keseluruhan pengeluaran yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2019). Belanja daerah harus dilakukan secara terkendali berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan, karena sangat menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sangat rawan akan terjadinya kebocoran.

Analisis belanja penting dilakukan untuk melihat apakah pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah telah melakukan efektivitas dan efisiensi anggaran serta menghindari pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Makka, 2015). Pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan belanja daerah secara merata untuk pembangunan daerah demi tercapainya pelayanan publik (May, 2022). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), metode analisis anggaran yang dapat digunakan adalah analisis kinerja belanja yang terdiri dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja.

Dalam rangka melakukan analisis yang mendalam terhadap laporan keuangan pemerintah daerah khususnya laporan realisasi anggaran, perlu juga

membaca dan memanfaatkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK berisi penjelasan lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan termasuk laporan realisasi anggaran. Oleh karena itu, informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tidak dapat diabaikan sebagai sumber tambahan informasi dalam melakukan analisis (Mahmudi, 2019).

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat. Masyarakat memasuki era keterbukaan dimana masyarakat sudah semakin pandai dan dapat mengakses seluruh informasi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini pula yang memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana publik (Tantri, 2018).

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja telah menyampaikan laporan keuangan termasuk salah satu komponennya yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tana Toraja. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja melalui Dinas Pariwisata Tana Toraja dari tahun 2018-2021, seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Tana Toraja

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
2018	5.782.053.522,00	5.762.240.796,00	99,65	19.812.726,00
2019	11.980.559.471,00	11.454.824.545,00	95,61	525.734.926,00
2020	6.576.987.000,00	6.133.532.838,00	93,25	443.454.162,00
2021	8.206.745.501,00	5.640.383.966,00	68,73	2.566.361.535,00

Sumber: PPID Kabupaten Tana Toraja, diolah

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat anggaran, realisasi, persentase dan juga selisih belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2018-2021. Periode anggaran tahun 2018-2021 anggaran yang ditetapkan mengalami penurunan dan peningkatan, demikian juga terjadi dengan realisasi anggaran. Anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp5.782.053.522,00 dengan realisasi anggaran mencapai 99,65% yaitu sebesar Rp19.812.726,00. Kemudian, pada tahun 2019 terjadi peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar Rp11.980.559.471,00 dengan realisasi sebesar Rp11.454.824.545,00, sehingga pencapaiannya 95,61%. Pada tahun 2020 anggaran tahunan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp6.576.987.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.133.532.838,00 dengan pencapaian 93,25% yang berarti terjadi penurunan dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 anggaran yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar Rp8.206.745.501,00 dengan realisasi sebesar Rp5.640.383.966,00. Meskipun mengalami kenaikan namun pencapaian mengalami penurunan yang cukup jauh yaitu sebesar 68,73%.

Anggaran dengan realisasinya akan menunjukkan bagaimana efektivitas dan efisiensi Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja dalam mengelola keuangan selama satu periode tertentu. Oleh karena itu, melalui alat ukur berupa analisis kinerja belanja, dapat terlihat tingkat efisiensi dan penyerapan anggaran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja dalam satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja tersebut dapat dilakukan menggunakan analisis varians belanja yang dapat ditunjukkan dalam bentuk nominal ataupun persentase.

Sementara pengukuran pertumbuhan belanja dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan belanja dalam hal ini apakah terjadi kenaikan atau penurunan yang bersifat positif atau negatif di Dinas Pariwisata Kabupaten Tana

Toraja. Pengukuran kinerja lainnya dapat dilakukan dengan analisis keserasian belanja. Analisis ini memberikan informasi mengenai keseimbangan antar belanja yang mana akan tergambar tentang bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja memprioritaskan dana dengan baik pada belanja operasi maupun belanja modal. Pengukuran selanjutnya yaitu rasio efisiensi belanja. Pengukuran ini dapat membantu untuk menunjukkan efisiensi belanja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja. Selain itu, analisis terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di dalamnya memuat realisasi belanja dan capaian *output* juga dianggap perlu sebagai tambahan untuk mengukur kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja telah menjalankan fungsinya dalam mengelola keuangan. Tetapi masih banyak ditemukan terjadi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan pemborosan yang tidak dapat mendongkrak pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, fenomena pembangunan toilet di salah satu kawasan wisata. Proyek ini banyak menjadi sorotan masyarakat hingga saat ini, karena menelan anggaran sangat fantastis sebesar Rp1.400.000.000,00, namun hingga saat ini tidak pernah digunakan karena sarana prasarana pendukung seperti pasokan air tidak terpenuhi (JawaPos, 2023).

Melihat kondisi yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Tana Toraja dan juga wisatawan tidak dapat merasakan manfaat apapun dari alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja. Hal ini mengakibatkan adanya potensi realisasi anggaran tidak mencapai *ouput* yang ditargetkan sehingga tanggung jawab pemerintah atas penggunaan dana yang efektif dan efisien tidak dapat tercapai.

Menurut Mahsun (2006:146) terdapat tiga siklus utama dalam mengelola keuangan yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. Hal ini sangat penting dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, karena sifat belanja yang sangat mudah dilakukan mengakibatkan rawan akan terjadinya kebocoran dan inefisiensi. Oleh karena itu, tata kelola yang baik dan pengukuran kinerja melalui analisis kinerja belanja dan ditambah dengan analisis terhadap LAKIP harus dilakukan, agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pembangunan khususnya di bidang kepariwisataan menjadi lebih baik di masa yang akan datang (Chartady, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pertumbuhan realisasi anggaran belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja tahun 2018-2021?
2. Apakah penggunaan anggaran belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja tahun 2018-2021 telah efisien?
3. Apakah Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja telah mengoptimalkan alokasi anggaran melalui harmonisasi belanja antara belanja operasi dan belanja modal?
4. Bagaimana kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja ditinjau dari capaian *output*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis tingkat pertumbuhan realisasi belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja tahun 2018-2021.

2. Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja tahun 2018-2021.
3. Menganalisis optimalisasi alokasi penggunaan anggaran dengan mengharmonisasikan belanja operasi dan belanja modal.
4. Menganalisis kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja ditinjau dari capaian *outputnya*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah pada bidang akuntansi dalam kaitannya dengan kinerja anggaran belanja pada Dinas Pariwisata Tana Toraja periode tahun 2018-2021 menggunakan analisis kinerja belanja. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi para akademisi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan saran dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai pengelolaan yang baik dan peningkatan kinerja anggaran belanja.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja dalam mengelola dan menggunakan anggaran.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap ilmu akuntansi, sehingga dapat diterapkan di masa yang akan datang dan terlebih lagi dapat digunakan dalam menyelesaikan studi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dengan uraian sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan ini pada dasarnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan proses peninjauan pustaka terkait teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini berisikan penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari kinerja anggaran belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan hasil penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar dalam melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap sebuah fenomena dan realitas tertentu dan disusun secara sistematis. Uraian berbagai definisi, konsep-konsep, aturan-aturan, dan langkah-langkah yang terkait dengan sebuah penelitian dimuat pada bagian ini (Ramdhan, 2021).

2.1.1 Allocative Efficiency (Efisiensi Alokasi)

Efisiensi alokasi berkaitan dengan pendistribusian sumber daya yang ada pada program dan kegiatan yang lebih efektif dalam rangka mencapai target pembangunan nasional. Implementasinya bagi pemerintah adalah bagaimana pemerintah harus mempertegas hubungan antara prioritas, program, dan kegiatan dengan penganggarnya. Prioritas yang sudah ditentukan kemudian memiliki perhitungan anggaran yang jelas dan terukur, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai target pembangunan nasional. Penerapan konsep efisiensi alokasi dilaksanakan melalui anggaran berbasis kinerja (*performances based budgeting*).

Prinsip anggaran berbasis kinerja menghubungkan anggaran dalam hal ini pengeluaran pemerintah dengan hasil yang diharapkan, sehingga diharapkan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan (Sancoko,2008). Anggaran berbasis kinerja dilakukan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran belanja

dengan output dan outcome yang jelas dan sesuai dengan prioritas nasional (Halim, 2012).

2.1.2 Pengukuran Kinerja Sektor Publik

a. Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran tentang tingkat ketercapaian dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuan sebuah organisasi yang dituangkan dalam rencana strategi. Kinerja berguna untuk memberikan informasi tentang keberhasilan atau prestasi yang telah dicapai baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mahsun, 2006).

Hasil dari suatu pencapaian dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari kinerja sebuah organisasi. Sehingga sebagai salah satu organisasi, organisasi sektor publik sebagai pengguna dana publik perlu mengetahui hasil yang telah diacapai melalui kinerja. Oleh karena itu, organisasi sektor publik wajib melakukan penilaian kinerja untuk mengukur apakah organisasi telah berhasil atau gagal dalam menjalankan programnya sebagai pengelola keuangan (Arfan, 2014).

Melalui beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan sebuah kondisi yang wajib diketahui oleh semua pihak termasuk masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dana publik dan sekaligus sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melihat usaha pemerintah dalam mencapai pelayanan yang optimal untuk memenuhi kepentingan publik.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah dasar dalam melakukan penilaian kinerja. Mardiasmo (2009:121) dalam bukunya menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian dan implementasi strategi melalui alat ukur finansial maupun nonfinansial. Terdapat tiga alasan perlunya dilakukan pengukuran kinerja sektor publik sebagai berikut (Mardiasmo, 2009).

- 1) *Pengukuran kinerja sektor publik dapat membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Tolok ukur yang digunakan yaitu dengan berfokus pada sasaran dan tujuan setiap unit kerja, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik.*
- 2) *Pengukuran kinerja sektor publik dapat membantu dalam pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya yang ada.*
- 3) *Pengukuran kinerja sektor publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan perbaikan komunikasi antarlembaga.*

c. Tujuan Pengukuran Kinerja

Mahmudi (2007) menyatakan bahwa tujuan dilakukannya pengukuran kinerja organisasi sektor publik sebagai berikut.

- 1) *Mengetahui sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai.*
- 2) *Menjadi sarana pembelajaran bagi setiap pegawai dalam sebuah organisasi.*
- 3) *Memperbaiki kinerja organisasi pada periode selanjutnya.*
- 4) *Memberikan pertimbangan secara sistematis dalam membuat keputusan pemberian reward dan punishment.*
- 5) *Memberikan motivasi kepada pegawai.*
- 6) *Menciptakan akuntabilitas publik.*

Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan program yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh organisasi dalam hal ini pemerintah sebagai pengelola keuangan, sehingga dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik lagi ke depannya.

d. Manfaat Pengukuran Kinerja

Mahsun (2006:33) menyatakan bahwa manfaat pengukuran kinerja sebagai berikut.

- 1) *Memberikan petunjuk untuk mencapai target yang telah disusun sebelumnya*
- 2) *Memberikan pengawasan atas pencapaian kinerja dan memberikan koreksi untuk memperbaiki kinerja*
- 3) *Memperbaiki kinerja organisasi melalui diskusi antara pimpinan dan bawahan*
- 4) *Mengetahui apakah kepuasan pelanggan dalam hal ini masyarakat telah terpenuhi*
- 5) *Membantu mempelajari dan memahami proses kegiatan pada instansi pemerintah*
- 6) *Membantu meyakinkan bahwa keputusan yang diambil telah dilakukan secara objektif.*

2.1.3 Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang membahas mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dijelaskan bahwa LRA merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang dapat menunjukkan kepatuhan pemerintah pusat dan daerah terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target yang telah disepakati dengan melihat perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan pemerintah dapat memperoleh informasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya (Ruliaty, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa unsur-unsur yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut.

- 1) *Belanja.*
- 2) *Pendapatan.*
- 3) *Transfer.*
- 4) *Surplus/Defisit LRA.*
- 5) *Pembiayaan.*

6) *Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.*

2.1.4 Anggaran Sektor Publik

a. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah alat komunikasi pada setiap bagian di dalam pemerintahan atau biasa juga disebut dengan komitmen dan kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif atas penggunaan dana publik dalam bentuk dokumen untuk mempermudah koordinasi. Anggaran sektor publik dibuat dalam rangka menentukan kebutuhan masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan alat untuk memantau posisi keuangan dan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2009).

Anggaran sektor publik adalah bentuk pertanggungjawaban dari pimpinan dalam sebuah entitas untuk menginformasikan kepada seluruh anggota terkait keseluruhan aktivitas dan kegiatan entitas atas pelaksanaan seluruh rencana yang menggunakan dana publik dan pengelolaannya (Sujarweni, 2015:28).

Berdasarkan uraian mengenai pengertian anggaran sektor publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana yang telah disepakati sebelumnya dan sekaligus informasi yang berisi aktivitas dan kegiatan penggunaan dana publik, sehingga memiliki peran penting dalam proses penilaian kinerja organisasi dalam hal ini pemerintah.

b. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Ada beberapa fungsi utama dari anggaran sektor publik menurut Halim (2012) sebagai berikut.

1) *Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning)*

Anggaran merupakan alat pengendali bagi pihak manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran sektor publik berguna untuk memberikan gambaran mengenai rencana kegiatan apa saja yang akan dilakukan disertai dengan rincian biaya dan sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh organisasi sektor publik.

2) *Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control)*

Anggaran sebagai alat pengendalian organisasi untuk bekerja secara efektif dan efisien, sehingga dapat terhindar dari korupsi dan pemborosan terhadap dana publik. Anggaran sebagai pengendali manajerial juga berfungsi untuk meyakinkan organisasi sektor publik bahwa organisasi memiliki sumber dana untuk membiayai program yang telah direncanakan dalam organisasi sektor publik.

3) *Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal)*

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana kebijakan akan dijalankan oleh organisasi sektor publik, sehingga organisasi sektor publik akan dengan mudah untuk menetapkan prediksi dan estimasi ekonomi dan organisasi. Selain itu, anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat demi percepatan pertumbuhan ekonomi.

4) *Anggaran Sebagai Alat Politik (Political)*

Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik dalam bentuk dokumen politik yang dijadikan sebagai komitmen antara eksekutif dengan legislatif atas penggunaan dana publik dalam rangka melaksanakan kepentingan tertentu.

5) *Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication)*

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi ke seluruh bagian organisasi. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu bagian organisasi di dalam pencapaian tujuan organisasi.

6) *Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement)*

Penilaian kinerja manajemen sektor publik dilakukan atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dicapai serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja organisasi.

7) *Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)*

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada setiap anggota organisasi mulai dari pimpinan hingga karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Anggaran yang tepat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan tujuan organisasi merupakan kinerja yang baik bagi pihak manajemen dalam organisasi.

8) *Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere)*

Anggaran dapat digunakan sebagai alat menciptakan ruang publik, yang mana seluruh organisasi sektor publik seperti DPR/MPR, birokrat, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan organisasi

kemasyarakatan lainnya harus terlibat di dalam proses penganggaran untuk mencapai kepentingan bersama.

2.1.5 Teori Stewardship

Teori *stewardship* adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer dimana pemilik bertindak sebagai *principal* dan manajer bertindak sebagai *steward*. Teori ini menganggap bahwa manajer (*steward*) sebagai pengelola mengesampingkan kepentingannya demi kepentingan dari pemilik (*principal*) untuk mencapai kesuksesan organisasi. Tentunya ada kepentingan masing-masing antara *steward* dan *principal*, namun *steward* akan terus menjunjung nilai-nilai kebersamaan untuk dapat melayani (Anton, 2010). Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik salah satunya organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Jefri, 2018).

Rakyat sebagai pemilik sumber daya memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan secara maksimal. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya, pemerintah (*steward*) wajib memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi rakyat (*principal*) untuk melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan kehadiran Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja yang merupakan organisasi sektor publik yang dipercaya masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi yaitu pelayanan publik yang optimal dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam rangka melaksanakan tujuan organisasi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja (*steward*) perlu berupaya dengan segala kemampuan

dalam mengelola keuangan daerah untuk mencapai sebuah kesuksesan organisasi yaitu kinerja organisasi yang berjalan efektif dan efisien.

2.1.6 Analisis Kinerja Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah adalah keseluruhan pengeluaran yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2019:153).

Bastian (2006) dalam bukunya menyatakan bahwa belanja daerah merupakan estimasi beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi kepada seluruh masyarakat untuk dinikmati dalam bentuk pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis belanja, organisasi, dan fungsinya. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 PSAP 02 tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Pengeluaran operasional digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang memberikan manfaat langsung. Belanja operasi meliputi: a) belanja pegawai, b) belanja barang, c) bunga, d) subsidi, e) hibah, dan f) bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berwujud yang akan memberi manfaat dalam jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi:

- a) *Belanja modal tanah*
- b) *Belanja modal peralatan dan mesin*
- c) *Belanja modal gedung dan bangunan*
- d) *Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan*
- e) *Belanja modal aset tetap lainnya*
- f) *Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)*

3) *Belanja Lain-lain/Belanja Tak Terduga*

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah pusat atau daerah dalam menjalankan kewenangannya.

4) *Belanja Transfer*

Belanja transfer adalah pengeluaran dana dari sebuah entitas ke entitas lainnya, seperti dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

b. Jenis-Jenis Analisis Kinerja Belanja

1) Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap selisih antara anggaran dan realisasi belanja. Selisih anggaran belanja memiliki dua kategori, sebagai berikut: selisih disukai (*favourable variance*), yaitu realisasi belanja lebih kecil dari anggaran dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*), yaitu realisasi belanja lebih besar dari anggaran (Mahmudi, 2019:155).

Analisis varians belanja dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Terjadinya selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang signifikan dapat menimbulkan dua kemungkinan, pertama hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran; kedua jika terjadi selisih kurang maka bisa jadi mengindikasikan bahwa telah terjadi kelemahan dalam proses perencanaan estimasi belanja atau

tidak terserapnya anggaran disebabkan oleh adanya program yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam anggaran, tidak dijalankan oleh eksekutif (Mahmudi, 2019:157).

Anggaran belanja merupakan ambang batas tertinggi atas pengeluaran. Kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dinilai baik jika pemerintah mampu melakukan efisiensi belanja, sebaliknya apabila realisasi melebihi anggaran yang ditetapkan maka akan menunjukkan kinerja yang kurang baik (Suhaedi, 2019). Namun, perlu didalami lagi lebih lanjut bahwa apakah realisasi anggaran yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan disebabkan oleh kinerja yang baik atau justru merupakan kinerja yang buruk dari pemerintah daerah. Apabila pengendalian yang ketat dilakukan oleh pemerintah daerah, maka hal itu dapat mengindikasikan bahwa telah terjadi penghematan dan menunjukkan tercapainya sebuah prestasi dalam hal ini kinerja yang baik. Di sisi lain, apabila anggaran tidak terserap disebabkan oleh karena adanya program yang tidak berjalan, maka hal itu juga mengindikasikan penghematan, namun menunjukkan sebuah prestasi yang dianggap semu. Meskipun dianggap sebagai prestasi yang semu, hal tersebut masih dapat dikatakan lebih baik daripada terjadi pemborosan anggaran, karena penghematan anggaran pada tahun ini dapat digunakan untuk anggaran pada tahun berikutnya (Mahmudi, 2019:158).

2) Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja merupakan sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan setiap belanja antara satu periode dengan periode lainnya. Analisis ini tidak hanya

melihat berapa besar pertumbuhan belanja yang terjadi, melainkan juga melihat apakah pertumbuhan belanja terjadi secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Keseimbangan antara pertumbuhan belanja dan pertumbuhan pendapatan harus terjadi, karena jika tidak terjadi keseimbangan maka dapat mengganggu kelangsungan serta kesehatan fiskal daerah (Mahmudi, 2019:158).

Belanja cenderung selalu naik tiap tahunnya. Sehingga, untuk mengetahui apakah kenaikan yang terjadi masih dalam batas wajar atau tidak wajar maka perlu untuk melihat besarnya inflasi yang terjadi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah layanan yang diberikan, belanja apa yang paling mempengaruhi kenaikan pertumbuhan, dan faktor penyebab kenaikan belanja tersebut apakah disebabkan oleh faktor internal yang sudah direncanakan sebelumnya atau faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pada prinsipnya pertumbuhan belanja harus tetap terkendali agar stabilitas fiskal tetap terjaga (Mahmudi, 2019:160).

Analisis pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan belanja tahun } t = \frac{\text{Realisasi belanja tahun}_{(t)} - \text{Realisasi belanja tahun}_{(t-1)}}{\text{Realisasi belanja tahun}_{(t-1)}}$$

3) Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah mengutamakan alokasi dana pada belanja rutin

dan belanja pembangunan secara maksimal. Apabila alokasi dana untuk belanja rutin memiliki persentase yang tinggi, maka alokasi belanja pembangunan yang digunakan untuk memberikan sarana dan prasarana ekonomi bagi masyarakat cenderung akan memiliki persentase yang kecil. Ada dua perhitungan dalam analisis keserasian belanja, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio belanja operasi adalah perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini memberitahu pembaca laporan mengenai berapa besar belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang sifatnya rutin dan jangka pendek, karena masa manfaatnya yang hanya dapat digunakan dalam kurun waktu satu tahun. Belanja operasi biasanya lebih mendominasi dibanding dengan belanja lainnya dari total belanja daerah yang berkisar di angka 60-90%. Tingkat pendapatan yang tinggi dari pemerintah daerah biasanya diikuti dengan porsi belanja operasi yang lebih tinggi, demikianpun sebaliknya pada pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang rendah (Mahmudi, 2019:164).

Rasio belanja operasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Belanja operasi terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal adalah perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal merupakan belanja yang sifatnya tidak rutin dan jangka menengah/jangka panjang, karena pengeluaran pada belanja ini dapat memberikan manfaat lebih dari

satu tahun anggaran. Umumnya, proporsi belanja modal terhadap belanja daerah berkisar di angka 5-20%. Melalui rasio belanja modal, pembaca laporan bisa mengetahui berapa besar belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal dalam rangka investasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengeluaran belanja modal akan memberi pengaruh terhadap neraca pemerintah daerah, yakni menambah aset daerah (Mahmudi, 2019:162).

Rasio belanja modal dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Belanja modal terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Sejauh ini, belum ada parameter yang pasti untuk menentukan besarnya belanja operasi dan belanja modal yang ideal terhadap APBD pemerintah daerah. Namun, belanja modal yang lebih tinggi dari belanja operasi tentu akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik karena tersedianya infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja (Bado, 2015).

Sebagai salah satu daerah yang berada di negara berkembang, pelaksanaan pembangunan tentunya masih sangat dibutuhkan dan gencar dilakukan. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang masih kecil perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan pemerintah daerah (Fathah, 2017).

4) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja daerah merupakan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk

mengetahui sejauh mana pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran. Pemerintah daerah dianggap telah mencapai efiseinsi anggaran apabila rasio efisiensinya kurang dari 100%, demikianpun sebaliknya apabila melebihi 100%, maka pemerintah daerah dianggap telah melakukan pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019:164).

Rasio efisiensi belanja diukur menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2019) kriteria nilai efisiensi dikategorikan sebagai berikut.

- 1) *Jika hasil perbandingan kurang dari 100%, maka dapat dikatakan bahwa anggaran belanja efisien.*
- 2) *Jika hasil perbandingan sama dengan 100%, maka dapat dikatakan anggaran belanja efisiensi seimbang.*
- 3) *Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka dapat dikatakan anggaran belanja tidak efisien.*

2.1.7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa LAKIP adalah sebuah laporan yang wajib dibuat oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. LAKIP bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan program selanjutnya di masa yang akan datang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan gambaran bagi peneliti untuk membandingkan antara penelitian yang hendak dikaji dengan penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa. Penelusuran secara mendalam atas penelitian terdahulu akan menambah informasi dan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian (Abdullah, 2015). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lainnya terkait dengan topik penelitian ini, sebagai berikut.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Tantri (2018) menggunakan data laporan realisasi anggaran pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016 sebagai objek untuk dianalisis. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa analisis varians belanja pada tahun 2012 terdapat selisih negatif sebesar 5,70% yang berarti bahwa pemerintah berhasil melakukan penghematan anggaran. Pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan berhasil melakukan penghematan sebesar 67,62% dan terus menurun sampai pada tahun 2016 sebesar 93,68% karena banyaknya program yang berjalan atau terealisasi. Dari segi pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan pertumbuhan belanja tertinggi sebesar 343,43% dan penurunan pertumbuhan belanja sebesar -53,87%. Namun secara keseluruhan pertumbuhan belanjanya sudah baik. Ditinjau dari analisis keserasian belanja khususnya analisis belanja operasi terhadap total belanja masuk dalam kategori baik karena rata-rata realisasi sebesar 81,33% yang digunakan untuk pemeliharaan sarana. Dan dilihat dari segi rasio efisiensi belanja

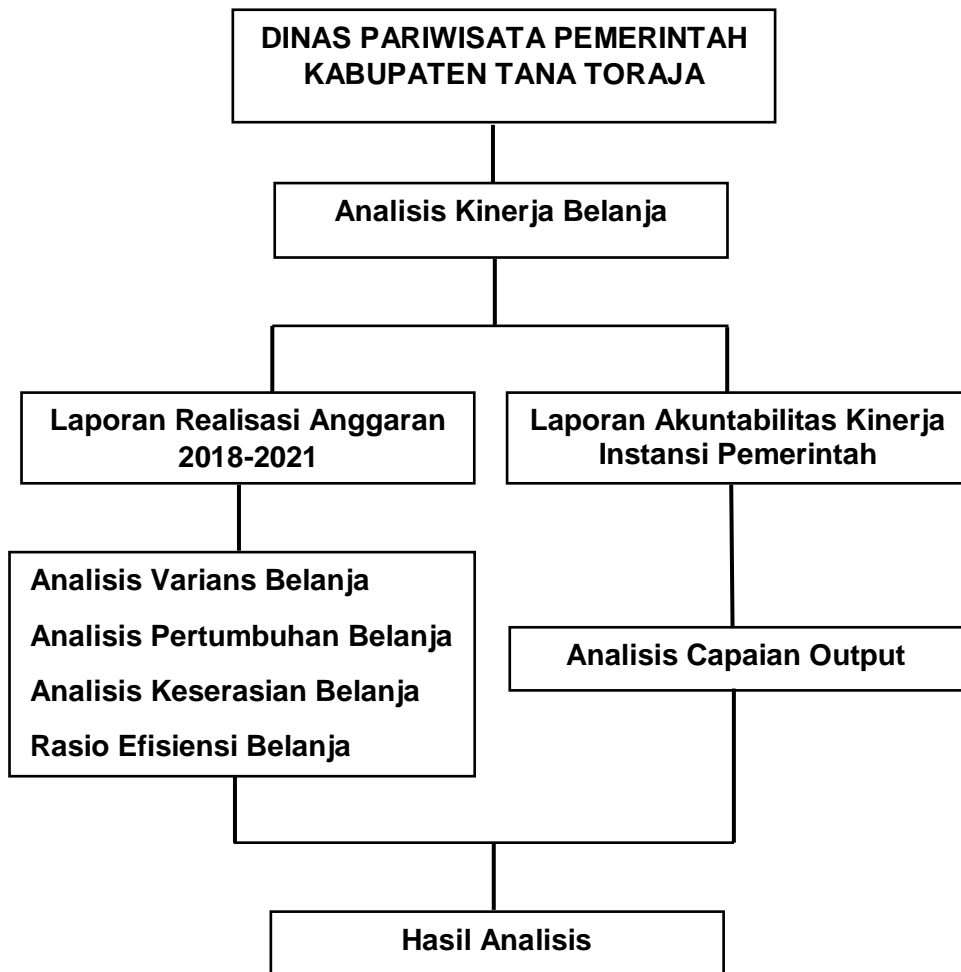
menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan DIY telah melakukan efisiensi dengan tingkat rasio efisiensinya kurang dari 100%.

- 2) Hasil penelitian Amelia (2022) menunjukkan bahwa melalui perhitungan analisis varians belanja, realisasi belanja tidak melebihi anggaran sehingga masuk dalam kategori baik. Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa di tahun 2018-2019 pemerintah daerah Sukabumi dapat meningkatkan pertumbuhan belanja dengan persentase sebesar 5% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2019-2020 terdapat penurunan pertumbuhan belanja akibat pandemi *covid-19* dengan persentase sebesar -2%. Dilihat dari analisis keserasian belanja yaitu rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan rata-rata belanja operasi sebesar 81,46% dan rata-rata belanja modal sebesar 16,39% yang berarti ada kinerja yang baik. Kemudian dari segi rasio efisiensi menunjukkan rata-rata sebesar 94,56%, sehingga pemerintah daerah Sukabumi dapat dikatakan efisien dalam menggunakan anggaran.
- 3) Penelitian Ratnasari (2019) menunjukkan bahwa dalam analisis varians belanja terdapat selisih antara anggaran belanja dengan realisasinya yang bersaldo negatif yaitu pada tahun 2016 sebesar 15,60% dan pada tahun 2017 sebesar 9,79% yang berarti Dinas Sosial Kabupaten Berau telah melakukan penghematan anggaran. Dilihat dari analisis keserasian belanja, menunjukkan rata-rata belanja operasi sebesar 95,88% dan rata-rata belanja modal sebesar 4,12%. Hal ini berarti bahwa Dinas Sosial Kabupaten Berau mengalokasikan belanja lebih besar pada belanja operasi untuk melaksanakan program sosial. Dan ditinjau dari analisis efisiensi belanja menunjukkan selama tahun

2016-2017 Dinas Sosial Kabupaten Berau sudah masuk dalam kategori efisiensi dengan rata-rata efisiensi belanja sebesar 87,30%.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini melibatkan Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019-2021 sebagai data yang akan dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja belanja daerah khususnya pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan diukur menggunakan analisis kinerja belanja, yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan kinerja belanja Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran